

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Halim, Icku Rangga Bawono dan Amin Dara. 2014. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Rahman. 2010. *Administrasi Pajak: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.
- Adenk Sudarwanto. 2013. *Akuntansi Koperasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anastasia Diana dan Lilis Setiawan. 2014. *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Bambang Widjajanta dan Aristanti Widyaningsih. 2007. *Mengasah Kemampuan Ekonomi*. Bandung : Citra Praya.
- Chairil Anwar Pohan. 2011. *Optimizing Corporate Tax Management : Kajian Perpajakan Dan Tax Planning-Nya Terkini*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Chairil Anwar Pohan. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Diaz Priantara. 2009. *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Erly Suandy. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanel, Alfred. 2005. *Organisasi Koperasi Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Organisasi Koperasi Dan Kebijakan Pengembangannya Di Negara-Negara Berkembang*. Edisi Pertama.
- Hendar dan Kusnadi. 2010. *Ekonomi Koperasi (Untuk Perguruan Tinggi)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Hery. 2014. *Akuntansi Perpajakan "Dibahas Secara Lugas, Sederhana, Dan Mudah Dipahami"*. Jakarta: PT Grasindo.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Ramudi Ariffin. 2013. *Koperasi sebagai perusahaan*. Sumedang : IKOPIN PRESS
- Rudianto. 2006. *Akuntansi Koperasi (Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan)*. Jakarta: PT Grasindo.
- Siti Resmi. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 6 Buku 1*. Jakarta Selatan : Salemba Empat.

Siti Resmi. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 7 Buku 1*. Jakarta Selatan : Salemba Empat.

Subandi. 2009. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. Bandung: Alfabeta, CV.

Subandi. 2010. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. Bandung: Alfabeta, CV.

Thomas Sumarsan. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi 5*. Jakarta : Salemba Empat.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Zain, Mohammad. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Perundang – undangan :

Pemerintah Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Lembaran Negara RI Tahun 2003, No. 17. Sekretariat Negara. Jakarta

Pemerintah Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No.36. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*. Lembaran Negara RI Tahun 1992, No. 25. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No.28. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2000, No. 34. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Lembaran Negara RI Tahun 2018, No. 23. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.03/2009 Tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 96. Sekretariat Negara. Jakarta.

Jurnal :

Handri Rori. “*Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan*”. Jurnal EMBA Volume 1 Nomor 3 Halaman 410-418, Juni 2013.

Laorens Silitonga. “*Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Andi Offset Cabang Manado*”. Jurnal EMBA Volume 1 Nomor 3 Halaman 829-839, September 2013.

Internet :

<https://www.online-pajak.com/kewajiban-membayar-pajak-bagi-wajib-pajak-badan> (diakses pada 23 Januari 2019 pukul 15:38 WIB)

<https://www.online-pajak.com/sumber-pendapatan-negara> (diakses pada 23 Januari 2019 pukul 20:42 WIB)

<https://www.kemenkeu.go.id> (diakses pada 8 Februari 2019 pukul 08:09 WIB)

www.pajak.go.id/content/221152-biaya---biaya-yang-tidak-dapat-dikurangkan-dari-penghasilan-bruto-non-deductible (diakses pada 19 Maret 2019 pukul 20:29 WIB)

www.pajak.go.id/content/112111131-biaya-biaya-yang-dapat-dikurangkan-dari-penghasilan-bruto-deductible-pasal-6-uu (diakses pada 19 Maret 2019 pukul 20:30 WIB)

www.pajak.go.id/content/22115121-ketentuan-penyusutan (diakses pada 19 Maret pukul 20:47 WIB)

ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/terkait&idcrypt=opij (diakses pada 19 Maret 2019 pukul 21:00 WIB)

Sumber Lainnya :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, 2017. Kecamatan Cisarua Dalam Angka.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, 2018. Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, 2018. Kecamatan Cisarua Dalam Angka.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, 2018. Kecamatan Parongpong Dalam Angka.

Bukti Penerimaan Surat (BPS) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, 2017.

Laporan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Unit Desa Sarwa Mukti (KUD Sarwa Mukti) Tahun 2014

Laporan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Unit Desa Sarwa Mukti (KUD Sarwa Mukti) Tahun 2015

Laporan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Unit Desa Sarwa Mukti (KUD Sarwa Mukti) Tahun 2016

Laporan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Unit Desa Sarwa Mukti (KUD Sarwa Mukti) Tahun 2017

Laporan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Unit Desa Sarwa Mukti (KUD Sarwa Mukti) Tahun 2018

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, 2014. KUD Sarwa Mukti.

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, 2015. KUD Sarwa Mukti.

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, 2016. KUD Sarwa Mukti.

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, 2017. KUD Sarwa Mukti.

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, 2018. KUD Sarwa Mukti.